

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAHDALAM PENGENDALIAN STUNTING
DI DESA LAIYAKECAMATAN CENRANAKABUPATEN MAROS**



Oleh:

SELPI SUKAESI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103420

PROGRAM STUDI ILMU ADADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN STUNTING
DI DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

SELPI SUKAESI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103420

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di
Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Selpi Sukaesi

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103420

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Haerana, S. Sos, M.Pd



Ahmad Harakan, S.IP.,M.Hi

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

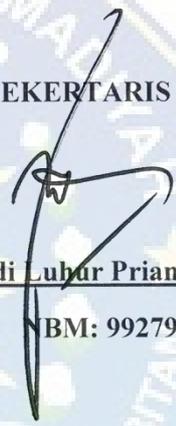
Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0263/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 21 Mei 2024.

Mengetahui:

KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

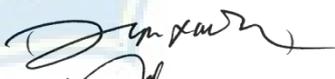
NBM: 730727

NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd
3. Wardah, S.Sos, MA
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I


()


()


()


()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Selpi Sukaesi

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103420

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 April 2024

Yang menyatakan,



SELPI SUKAESI

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibunda Dr. Haerana, S. Sos, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.Hi selaku pembimbing II yang senantiasa meluahkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.

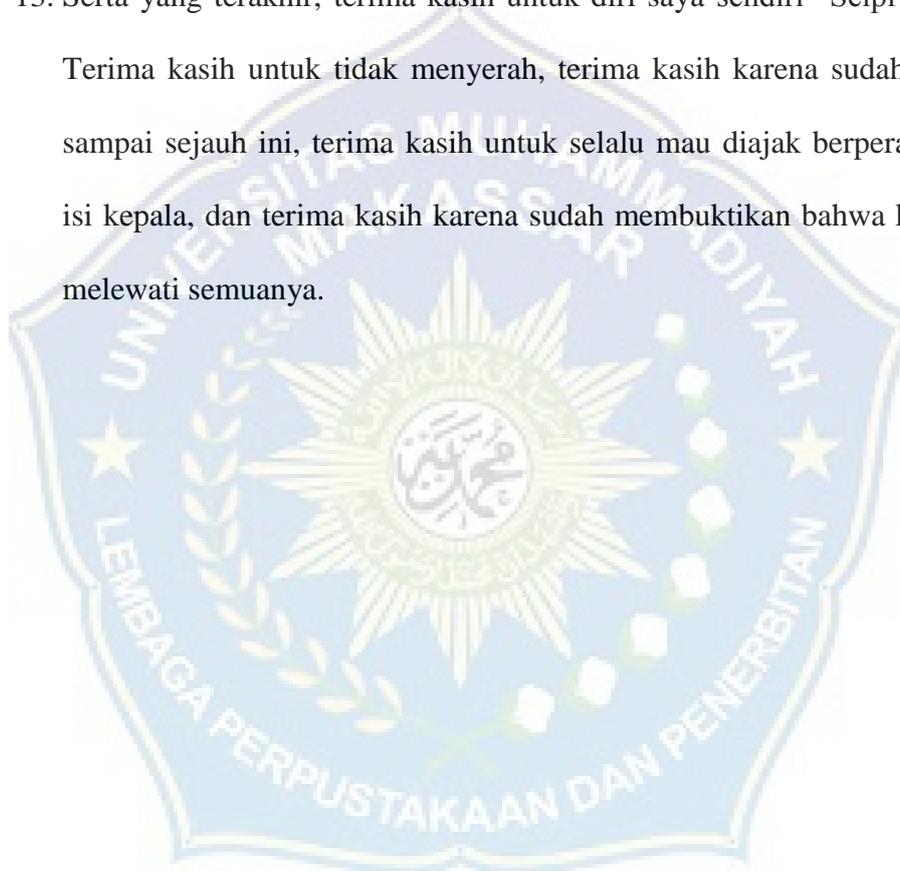
5. Kepada seluruh Dosen dan Staff Ilmu Politik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya selama berada dikampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada kepala Desa beserta Bidan desa dan Ketua Kader Posyandu di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang sangat membantu dalam memberi data sehingga dapat menyelesaikan Skripsi.
7. Bejuta-juta terima kasih untuk ayahanda tercinta “Bapak Sirajuddin”, terima kasih karena selalu mengusahakan pendidikan anak-anakmu, terima kasih karena selalu mendukung anak-anakmu dengan penuh kasih sayang, dan terima kasih sudah menjadi cinta pertama untuk putrimu ini pak.
8. Berjuta-juta terima kasih juga untuk ibu tercinta “Ibu Mariati”, terima kasih karena selalu menjadi penyemangat untuk anak-anakmu, terima kasih sudah selalu mendoakan setiap saat, sehingga penulis (putrimu) bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan target penulis.
9. Terima kasih kepada kakak dan adek-adek saya, zaenal Abidin, Suarni, Saiful Jamil, Sartika Sari, Muh. Yusuf dan Alya Ramadani yang senantiasa memberikan bantuan baik dari moral dan material serta doa yang senantiasa melangit.
10. Terima kasih untuk saudara tak sedara saya yaitu Irma, Meldawati, Indri Ayu Lestari dan Maulida Putri yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan doa yang tak henti-hentinya.
11. Terima kasih untuk teman-teman Next Generation ADN A, KKP dan teman-teman seangkatan sospol Angkatan 2020

Universitas Muhammadiyah Makassar, kebersamaan sungguh luar biasa yang akan selalu di kenang.

12. Terima kasih kepada Irfan yang telah menemani peneliti mengerjakan penelitian ini, mendengarkan keluh kesah, memberikan perhatian dan dukungan dengan penuh kesabaran.

13. Serta yang terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri “Selpi Sukaesi”.

Terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih untuk selalu mau diajak berperan dengan isi kepala, dan terima kasih karena sudah membuktikan bahwa kamu bisa melewati semuanya.



ABSTRAK

Selpi Sukaesi, Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. (dibimbing oleh Haerana dan Ahmad Harakan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengendalian stunting di desa laiya kecamatan cenrana kabupaten maros. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan peran pemerintah oleh Suhardono (2016) yaitu : Fasilitator, Mobilisator dan Regulator. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia, stunting pada balita dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2021 sebesar 7.1%. Sehingga menjadi masalah gizi kronis yang terjadi pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 2021, angka jumlah stunting di Kabupaten Maros 37,5%. Desa Laiya sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Cenrana, tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah sebagai fasilitator telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas dari gizi buruk. Peran pemerintah sebagai mobilisator cukup baik dalam mengedukasi dan menginspirasi orang tua atau remaja serta menyadarkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Peran pemerintah sebagai regulator telah berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting melalui Program pemberian makanan tambahan (PMT) dan memastikan layanan berkualitas bagi masyarakat guna untuk mencegah adanya stunting.

Kata Kunci : *peran pemerintah, Pengendalian Stunting, desa laiya*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Konsep Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	34
D. Fokus Penelitian	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37

C.	Sumber Data.....	37
D.	Informan Penelitian.....	38
E.	Teknik pengumpulan Data.....	38
F.	Teknik Analisis Data.....	39
G.	Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
A.	Deskripsi Lokus penelitian.....	50
B.	Hasil Penelitian	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Kasus stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang memerlukan penanganan serius seluruh pihak, sehingga saat ini pemerintah Indonesia telah menjadikan program penanganan stunting sebagai program prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara terintegrasi guna menekan peningkatan jumlah kasus.

Menurut pandangan Siampe et al (Jampur, 2023) *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh atau pertumbuhannya yang terhambat pada anak-anak akibat dari kekurangan nutrisi yang berlangsung lama, biasanya terjadi pada periode sering keterpaparan pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari rata-rata usianya, dan ini biasa berdampak pada kognitif, kecerdasan emosional, serta sistem kekebalan tubuh anak. Stunting pada masa kanak-kanak akan berdampak jangka panjang pada kesehatan dan kualitas hidup anak hingga dewasa, sehingga penting untuk mencegah dan mengatasi stunting dengan memberikan gizi yang cukup, baik pada masa kehamilan, masa menyusui dan pertumbuhan anak (Riwayanti et al. (Jampur, 2023).

Anak balita yang mengalami *stunting* menunjukkan adanya masalah gizi kronis yang perlu diatasi dan dicegah melalui praktik pemberian makanan yang benar dan sesuai standar. WHO menyatakan bahwa praktik pemberian makanan yang baik merupakan salah satu indikator untuk menilai kebutuhan nutrisi anak apakah sudah terpenuhi secara optimal atau tidak (WHO, 2018). Praktik pemberian makanan yang sesuai standar merupakan indikator yang perlu dipenuhi dalam memberikan kebutuhan nutrisi pada balita sesuai tumbuh kembang. Balita yang mengalami *stunting* merepresentasikan adanya masalah gizi kronis yang perlu di perbaiki melalui upaya pencegahan dan pengurangan gangguan secara langsung dan tidak langsung. Penanggulangan masalah *stunting* sangat efektif dilakukan pada 1000 hari kehidupan. Periode 1000 hari kehidupan meliputi 270 hari selama kehamilan, dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode kritis yang menentukan kualitas kehidupan (Kemenkes, 2016).

Permasalahan *stunting* tidak hanya terjadi di Indonesia, namun secara global juga didapati angka yang cukup memprihatinkan yaitu angka gizi buruk anak dibawah 5 tahun di dunia yang terdiri dari kategori kelebihan berat badan, *stunting* (anak dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan) dan *wasting* (anak dengan berat badan rendah) yang dilakukan pada survei rumah tangga tentang tinggi dan berat badan anak pada tahun 2020. Berdasarkan data bahwa sebanyak 5,7 persen atau 38,9 juta anak di dunia mengalami kelebihan berat badan, 22,0 atau 149,2 juta jiwa anak mengalami *stunting* dan 6,7 persen atau 45,4 juta jiwa

anak mengalami wasting. Chika Hayashi, Julia Krasevec, Richard Kumapley, 2021 (Rahman et al., 2023).

Selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2021 angka prevalensi Stunting Nasional mengalami penurunan angka, hal ini tentunya sejalan dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi meskipun trendnya menurun diperlukan strategi dalam mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%, maka dalam kurun waktu 3 tahun kedepan harus bisa menurunkan prevalensi tersebut sekitar 10% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2021 angka stunting di Indonesia sebesar 24,4% dan pada tahun 2022 sebanyak 21,6% (BKPK, 2023). Menurut pendapat Wapres dan Litbangkes, 2021 (dalam Rahman et al., 2023).

Pada sebaran status Gizi Balita berdasarkan komposit tinggi badan menurut umur dan berat badan menjelaskan mengenai Prevalensi Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2021 dari segi perkembangan gizi Balita yaitu stunting, wasting dan underweight. Ditemukan prevalensi stunting mengalami penurunan dari 27.7% tahun 2019 menjadi 24.4% tahun 2021, akan tetapi pada prevalensi underweight terjadi peningkatan angka dari 16.3% menjadi 17% sedangkan wasted dari 7,4% tahun 2019 menjadi 7.1% di tahun 2021. Menurut pendapat Kemenkes RI, 2021 (dalam Rahman et al., 2023).

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Stunting dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan dan perkembangan anak, seperti

menurunkan kemampuan belajar, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 27,67% atau sekitar 9,8 juta anak balita.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian pemerintah adalah stunting. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan.

Berdasarkan Keppres Nomor 72 Tahun 2021, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang sering terjadi, ditandai dengan tinggi badan di bawah standar TB ideal sesuai umur yang ditetapkan oleh Menteri Pengelola urusan dinas kesehatan. Penetapan stunting didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) < -2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan < -3 SD (sangat pendek / severely stunted). Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan bulan).

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak,

kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dampak jangka panjang yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan presentasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, resiko untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua serta kualitas kerja yang tidak kompetitif (WHO, 2018; Kemenkes RI, 2017).

Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting. Sesuai dengan peran pemerintah desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa dituntut untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Observasi awal yang dilakukan mengenai informasi prevalensi stunting di Desa Laiya melalui Puskesmas Cenrana angka stunting yang tebilang dari 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 tercatat 48 balita di bulan agustus. Tahun 2022 tercatat 66 balita di bulan agustus dan tahun 2023 tercatat 33 balita di bulan agustus. Melihat dari rekapan data yang diambil dari Puskesmas Cenrana, terdapat intervensi yang cukup baik mengenai angka prevalensi stunting yang begitu terlihat dari tahun sebelumnya sampai tahun ini, sehingga kejadian tersebut menjadi sumber acuan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan stunting yang didukung dari bantuan dana pemerintah untuk setiap desa di Indonesia dalam melakukan pencegahan resiko stunting terkhusus di desa Laiya yang menjadi lokasi penelitian.

Data penderita stunting tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Penderita Stunting



Sumber data pevelensi stunting PKM Puskesmas Cenrana

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Desa Laiya menduduki penderita stunting pertama dari desa-desa yang lain dimana menunjukkan angka balita stunting mencapai 48 dari jumlah balita yang diukur 263 anak. Selanjut kita lihat gambar pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu:

Gambar 1.2 Presentase stunting 2022-2023



sember data PKM puskesmas cenrana

Jumlah balita ditimbang dan diukur, tahun 2022	193	68	102	172	98	149	87	869
Jumlah balita stunting 2022	66	19	19	26	14	17	8	169
Jumlah balita ditimbang dan diukur, 2023	194	99	72	96	159	91	181	890
Jumlah balita stunting 2023	33	13	8	9	15	8	10	96

Dari gambar dan tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Laiya kembali menduduki balita stunting tertinggi di 2022 dari desa-desa yang lain dimana mencapai 66 balita terdeteksi stunting dari 193 anak, terlihat jelas perbandingannya dengan tahun 2021 dimana stunting melaju sangat tinggi pada tahun 2022 sehingga pemerintah desa Laiya bekerja keras dalam menurunkan stunting yang menjadi permasalahan utama yang ada di indonesia, pada tahun 2023 stunting mengalami penurunan drastis menjadi 33 balita stunting dari 194

anak yang ada di Desa Laiya sehingga perlu perhatian pemerintah terhadap stunting yang di sebabkan kekurangan gizi.

Pemerintah desa juga mencoba menjalin kerja sama antara perangkat desa, bidan desa, dan pemuda setempat untuk membentuk program penanggulangan gizi buruk stunting. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Laiya yang terletak di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain memberikan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada kader posyandu untuk megedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting di 1000 (PHK) hari pertama kehidupan, dengan peserta TP-PKK khususnya Pokja IV yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program kesehatan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang baik. Pemerintah desa juga melibatkan bidan desa dengan seringkali berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun hal ini belum optimal karena adanya beberapa kendala, seperti kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan konsultasi stunting dan posyandu, karena mayoritas penduduk berkerja sebagai petani dan buruh tani serta senang berkerja untuk mencari nafkah. Sulitnya perjalan dari rumah menuju lokasi posyandu yang jaraknya relatif jauh, dengan sendirinya menjadi tantangan dalam pelaksanaan program yang direncanakan. Dengan adanya kendala tersebut, pemerintah desa memerlukan inovasi diluar sosialisasi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dampak stunting. Pemerintah desa tentunya memiliki tanggung jawab untuk memeberikan dukungan bagi para kader agar mampu melaksanakan tugas dan pelayanan secara

optimal. Dengan adanya sosialisasi akan penting pemahaman pola hidup sehat dan pola asuh yang baik pada anak, layanan menunjang kegiatan di bidang kesehatan, guna menurunkan kasus stunting di desa Laiya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan adanya peran pemerintah dalam Pengendalian *stunting* di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Yang nantinya dapat berguna untuk memperbaiki sistem dari program ini sehingga dapat dijalankan secara maksimal, serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam segi layanan khususnya untuk menekan kasus *stunting*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis, diharapkan penelitian ini mampu berfungsi sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung untuk penelitian atau pihak lain.
2. Paraktis, diharapkan pemerintah mampu mewujudkan pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai bahan pembandingan dan refrensi untuk melakukan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Berikut beberapa penelitian sebelumnya:

Tabel Penelitian Terdahulu 2.1

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nur Azizah, Nastia, 2022)	Strategis Dinas Kesehatan Dalam Menekankan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Buton Selatan	Metode yang di gunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif kualitatif	Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh hasil penelitian yang telah dilakukan di dinas kesehatan ini dalam pencegah stunting dari berbagai program yang tersusun salah satunya kita melakukan sosialisasi dan seminar untuk mengajak kaum ibu memperhatikan pola hidup sehat. Terutama pada saat hamil. Di ketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah ada dampak positif karena masyarakat yang awalnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan stunting kini sudah memiliki kesadaran betapa pentingnya menjaga kesehatan.

2	(Regita & Prathama, 2023)	Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi	Metode yang di gunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif kualitatif	Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat di simpulkan bahwa Untuk menanggulangi stunting secara efektif, penting untuk melibatkan beberapa pemangku kepentingan terutama ditingkat daerah. Pemerintahan desa memegang peran sebagai ujung tombak pengentasan stunting, terutama dalam upaya promotif dan preventif. Intervensi gizi efektif dibutuhkan untuk mengurangi stunting. Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua fokus intervensi Pemerintahan Desa Wedoro dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
3	(Suhroh & Pradana, 2021)	Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Peneliti akan meneliti dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Upaya pemerintah Desa Ko'olan diantaranya yaitu menyediakan sarana dan prasarana seperti pemberian vitamin dan penyediaan poskesdes, alokasi dana desa sebesar Rp.18.000.000 untuk layanan kesehatan, menjalin kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu. Pada bulan oktober sampai dengan desember 2019 terdapat 28 anak usia 0-

		di Kabupaten Bangkalan.		2 tahun terdaftar dalam formulir posyandu, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pengurus GOPO, pengelolaan anggaran dana desa serta media sosial sebagai sarana informasi bagi masyarakat.
--	--	-------------------------	--	--

Sumber data Artikel 2024

Pada tabel diatas, penelitian yang telah dilakukan oleh (Nur Azizah, Nastia, 2022)Strategis Dinas Kesehatan Dalam Menekankan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Buton Selatan.Di temukan persamaan yaitu sama-sama menrunkan angka stunting dan metode yang di gunakan yait metode deskriptif atau pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian seblumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan.Teorii yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori yang dikemukakan oleh Kooten (dalam salusu 2006) yaitu: a) Strategi Organisasi, b) Strategi Program, dan c) Strategi Pendukung Sumber Daya.

Kemudian pada tabel kedua dilakukan (Regita & Prathama, 2023)Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Ditemukan persamaan pada fokus penelitian dan metode yang di gunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Mauluddin dan Novianti

(2020) yang meliputi: 1) Kecukupan asupan makan dan gizi, 2) Pemberian makan, perawatan dan pola asuh dan 3) Layanan pengobatan infeksi atau penyakit.

Kemudian pada tabel ketiga dikemukakan oleh (suhroh dan pradana, 2021) Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Terdapat persamaan pada fokus penelitian dan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori Yeti (dalam pastika, 2017) yang meliputi: 1) Ketersediaan sarana dan prasarana, 2) Ketersediaan anggaran, 3) Kemitraan dan 4) Partisipasi dari masyarakat.

B. Konsep Teori

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah

beban atau tugas Suharimin, 2018 dalam (Sihombing, 2022).

Menurut Soekanto, 2017 dalam (Sihombing, 2022) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila hak dan kewajiban telah dilakukan sesuai kedudukan. Menurut Narwako dan Suryanto (2019: 160) mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Menurut Rivai, 2004 dalam (Susantri & Putri, n.d.) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Ali, 2000:148).

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat

berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan dijalankan peranan. Menurut Soekanto, 2017 dalam (Sihombing, 2022)peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau

lembaga.

3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan.

Setiap peranan memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara individu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan peranannya tersebut, dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak (Znaniecki dalam Soekanto, 2017: 270) Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki status dan kedudukan tertentu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa adalah tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah secara etimologis ialah pemerintahan berasal dari kata dasar “Pemerintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba,

komando. Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *goverment* yang berasal dari bahasa Latin: *gubernare*, Greek *kybernao* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan (Ibrahim, 2010: 87). Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut Sumaryadi, 2010 dalam (Aridhayandi, 2018) mengemukakan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik.
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik.
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sehat.

3. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafi'ie. 2019 dalam (Sihombing, 2022) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki

wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretariat desa,

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

4. Peran Pemerintah Desa

Menurut Suhardono (2016: 38) menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang dalam menduduki jabatan. Adapun peran pemerintah desa adalah:

1. Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

Dari pengertian diatas, pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu orang yang menyediakan fasilitas dalam bentuk fisik dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Desa juga dapat menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan

2. Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna

untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama. Pemerintah Desa sebagai mobilisator dalam hal ini orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama.

3. Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembangunan).

Untuk memastikan bahwa stunting akhirnya di adopsi di Indonesia, pemerintah bahkan sekarang melanjutkan upayanya di bawah komando Presiden Republik Indonesia melalui peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Target telah ditetapkan, dan jika tidak direalisasikan secara penuh ke depan, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mencapai untuk mencapai target tersebut, salah satunya adalah menurunkan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Tujuan dan sasaran yang diamanatkan pemerintah.

5. Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Anggara, 2016: 109)

Dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di harapkan seluruh jajaran pemerintahan dapat memenuhi amanatnya dan bekerja sama untuk mempercepat proses pengurangan stunting pada penduduk. Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) yang diketuai oleh Kepala BKKBN merupakan instansi pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021. Hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 di 34 provinsi menemukan bahwa 27,67% anak Indonesia dibawah usia lima tahun mengalami *stunting*, Litha, 2020 (dalam Nur Hasrat Illahi). Versi organisasi kesehatan dunia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara dengan status gizi rendah karena hal tersebut.

Stunting memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara, termasuk anak muda yang kekurangan berat badan untuk usianya, tulang yang tidak berkembang dengan cepat, dan dia lebih pendek dari rekang-rekangnya.

Kekurang dalam diet anak selama tahun pertama kehidupan adalah penyebab utama stunting. Dalam konteks ini, seribuh hari di mulai pada saat pembuahan dan berlanjut hingga bayi berusia dua tahun. Jika ketersediaan nutrisi tidak mencukupi selama waktu ini, keterlibatan selanjutnya akan memiliki konsekuensi langsung dan jauh.

Menurut (Rahmadani & Lubis, 2023), peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan membuat ibu memahami adanya faktor risiko stunting pada perilaku makannya dan perilaku makan anaknya adalah dengan memberikan konseling gizi. Konseling gizi merupakan upaya perbaikan gizi untuk semua individu dan keluarga. Kegiatan ini merupakan tindakan nyata peningkatan kemampuan keluarga dalam memilih dan menentukan pemenuhan gizi yang tepat dalam siklus kehidupan. Proses konseling gizi harus mengikuti langkah-langkah Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Berikut ini adalah beberapa program yang dilakukan dalam program penanggulangan stunting di Puskesmas antara lain sebagai berikut.

- 1) Program penyuluhan terkait stunting.

Program penyuluhan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting dan cara pencegahannya. Stunting yang berarti pertumbuhan anak yang lambat, disebabkan oleh kurangnya nutrisi selama masa

kehamilan dan masa pertumbuhan awal. Program yang biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, demonstrasi, dan evaluasi serta dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting.

- 2) Program terkait pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak balita.

Program pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh posyandu balita dan ibu hamil meliputi beberapa kegiatan utama:

1. Pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi adalah posyandu memberikan pelayanan yang mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi untuk ibu hamil. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah gangguan pada masa kehamilan.
2. Pemasangan alat kontrasepsi (KB) adalah ibu hamil dapat melakukan pemasangan alat kontrasepsi (kb) di posyandu jika memungkinkan, setelah melahirkan.
3. Pemeriksaan bayi dan balita secara rutin adalah posyandu menyelenggarakan pemeriksaan bayi dan balita secara rutin untuk menyatukan tumbuh kembang anak dan mendeteksi gangguan tumbuh kembang sejak dini. Jenis

yang di selenggarakan posyandu untuk balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak, pelayanan evaluasi tumbuh kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang.

4. Imunisasi wajib adalah salah satu program pemerintah yang mewajibkan setiap anak usia dibawa satu tahun melakukan imunisasi. Posyandu menjadi salah satu pihak yang berhak menyelenggarakan program imunisasi tersebut, termasuk imunisasi hepatitis B, polio BCG, campak, dan DPT-HB-HiB.
5. Pemantauan status gizi adalah posyandu berperan penting dalam mencegah anak baduta dan balita desa keluarga yang berkualitas menjadi anak resiko stunting. Pelayanan gizi di posyandu meliputi penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen.
6. Pemantauan perkembangan anak adalah melalui kegiatan posyandu membantu menyatukan tumbuh kembang anak dan mendeteksi gangguan tumbuh kembang sejak dini. Jenis ini diselenggarakan posyandu untuk balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak, pelayanan evaluasi tumbuh

kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang.

Oleh karena itu, program posyandu balita dan ibu hamil fokus pada pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak balita, serta memberikan berbagai layanan kesehatan lainnya seperti imunisasi, pemantauan status gizi, dan pemantauan tumbuh kembang anak.

3) Kunjungan pelayanan antenatal care.

Kunjungan layanan antenatal care (ANC) adalah bagian penting dari pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan secara rutin untuk memantau kemajuan kehamilan dan memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Frekuensi kunjungan ANC yang direkomendasikan adalah minimal 6 kali selama masa kehamilan, dengan rincian 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 3 kali pada trimester ketiga. Berbagai pemeriksaan dan layanan seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkaran atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, memberikan tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet dan temu wicara (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa.

Kunjungan ANC yang rutin dan komprehensif dapat membantu mencegah gangguan kehamilan, meningkatkan kesadaran ibu mengenai tanda bahaya kehamilan, serta memastikan persalinan yang aman dan sehat untuk ibu dan bayi. Selain itu, kunjungan ANC juga membantu meningkatkan kesadaran ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif dan peran ibu dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.

- 4) Program pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan kepada balita.

Program pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan balita adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan status gizi dan mencegah stunting pada anak. Program ini meliputi program makanan tambahan yang aman dan berkualitas kepada balita, serta kegiatan pendukung lainnya yang memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan status gizi anak dan mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapai status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak. PMT untuk ibu hamil biasanya berupa suplemen vitamin A, dan B, dan zat besi yang baik di konsumsi selama masa menyusui. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah gangguan gizi pada masa kehamilan dan menyusui. Serta pemberian makanan tambahan PMT kepada balita dilakukan

dengan cara memberikan makanan tambahan yang aman dan berkualitas, seperti biskuit, kepada balita yang menderita gizi kurang (*wasting*). Kegiatan ini dilakukan oleh petugas puskesmas dan bidan desa setempat, dan menyampaikan pemberian makanan tambahan ini kepada balita yang menderita gizi kurang, serta mungkin juga balita yang tidak menderita gizi kurang.

Dalam beberapa kasus, PMT juga dilakukan untuk ibu hamil yang kekurangan energi kronis, dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu hamil. Oleh sebab itu, program PMT ini fokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita, serta mencegah stunting dan gangguan gizi pada masa kehamilan dan menyusui.

6. Pengendalian Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (*kerdil*) dari standar usianya.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak *stunted*, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/*kerdil*) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, ditegaskan oleh Menkes, kesehatan membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat.

a. Pemberian Makanan dan Pola Asuh

Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah “Isi Piringku” dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di

samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat.

Peran Pemerintahan Desa dalam aspek tersebut yaitu menyelenggarakan program Pos Gizi dengan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang diberikan kepada sasaran balita stunting dengan proporsi benar selama 3 bulan melalui kader kesehatan dan pemberian edukasi kepada ibu balita/pengasuh. Untuk mekanismenya selama 10 hari berturut-turut dalam satu bulan pertama balita stunting dibawa ke Balai Desa untuk diberikan makanan dengan menu yang berbeda setiap harinya. Pada hari pertama, anak akan diukur terlebih dahulu tinggi badannya dan setelah proses pemberian makan selama 10 hari dalam 3 bulan anak akan kembali diukur tinggi badannya. Sehingga akan terlihat apakah ada perubahan terhadap anak tersebut.

Program Pos Gizi tersebut dilakukan tidak hanya sekedar menyediakan PMT kepada balita stunting tetapi juga dengan cara bermain, bernyanyi bersama agar balita stunting tidak merasa bosan dalam kegiatan. Hal tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif bagi balita stunting. Selain itu, program pos gizi juga bertujuan sekaligus memberikan edukasi ibu balita stunting mengenai praktik pemberian makanan yang bergizi dan bagaimana dalam memberikan menu yang

berbeda setiap harinya sehingga anak tidak bosan untuk makan-makanan yang sama setiap harinya. Dalam hal ini pemberian makan merupakan kebiasaan memberikan makan anak dengan variasi makanan, pemilihan jenis makanan yang tepat dan bagaimana menanganinafsu makan anak yang rendah. Edukasi yang diberikan juga mengenai perawatan kesehatan terhadap anak dan pola asuh yang baik. Menurut Masri et al., (2021) menjelaskan bahwa Pos Gizi merupakan kegiatan pemulihan dan pendidikan gizi dengan cara pemberdayaanibu balita/pengasuh sehingga dapat terjadi perubahan perilaku dalam pemberian makan, pengasuhan, kebersihan diri, dan pemberianperawatan kesehatan.

b. Kecukupan Asupan Makanan dan Gizi

Pemerintahan desa memegang peran penting, Adanya komitmen bersama dan kerjasama dengan elemen masyarakat khususnya para orang tua dalam melakukan percepatan pencegahan stuntingmerupakan tugas pemerintahan desa melalui kader kesehatan dalam kecukupan asupan makanan yang tepatmengingat hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam Pemerintahan Desa memberikan sosialisasi melalui Program Kelas Ibu Hamil yang dilakukan oleh kader kesehatan. Program yang diberikan berupasosialiasi mengenai asupan makanan yang dibutuhkan ibu hamil selama masa mengandung untuk menghindari KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang akan berdampak pada lahirnya anak stunting.

Program Kelas Ibu Hamil tersebut dilaksanakan empat kali dalam satu bulan dengan materi yang berbeda-beda dengan membawa buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Informasi dalam Buku KIA bisa menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan kader sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat (Sugiharti et al., 2021). Buku KIA tersebut merupakan sumber informasi yang berguna bagi keluarga mengenai kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya serta alat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Suparmi, dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa Buku KIA berpengaruh terhadap meningkatnya pengetahuan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asupan yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan Balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan.

Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusui dini (IMD) dan berusahalah agar bayi mendapat colostrum air susu ibu (ASI). Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, namun berikan juga makanan pendamping ASI. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya

dengan membawa buah hati ke Posyandu setiap bulan.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di Posyandu atau Puskesmas.

c. Peningkatan Penyediaan Air Bersih dan Sarana Sanitasi

Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. “Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua (seorang ibu) maka, dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anaknya.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan Desatentuberusahauntuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada masyarakat. Salah satunya yaitu dalam menyediakan air bersih dan sarana sanitasi. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak lagi menggunakan air yang kurang layakuntuk dikonsumsi dan sanitasi yang kurang memadai sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan angka stunting.Dalam hal ini

Pemerintahan Desa dalam penyediaan air bersih mengenai PDAM telah terakses ke rumah-rumah warga namun masih terdapat beberapa rumah warga yang terkendala akses air bersih karena masih menggunakan sumur yang terkadang keruh. Hasil penelitian Otsuka et al., (2019), mengungkapkan bahwa rumah tangga yang mengonsumsi air minum bersumber dari air sumur dapat meningkatkan kejadian stunting pada anak dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan air tangki dan sumur. Meskipun peran yang ditunjukkan masih sebatas himbauan, akan tetapi dorongan yang dilakukan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan air bersih dan sarana sanitasi menjadi langkah alternatif yang tepat mengingat, sebagaimana menurut WHO (2018) dalam Nisa et al., (2021) bahwa air minum yang bersih dan memadai, sanitasi layak adalah intervensi kesehatan ekuitas yang utama.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori Peran pemerintah oleh Suhardono (2016) yang meliputi fasilitator, mobilisator, dan regulator.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

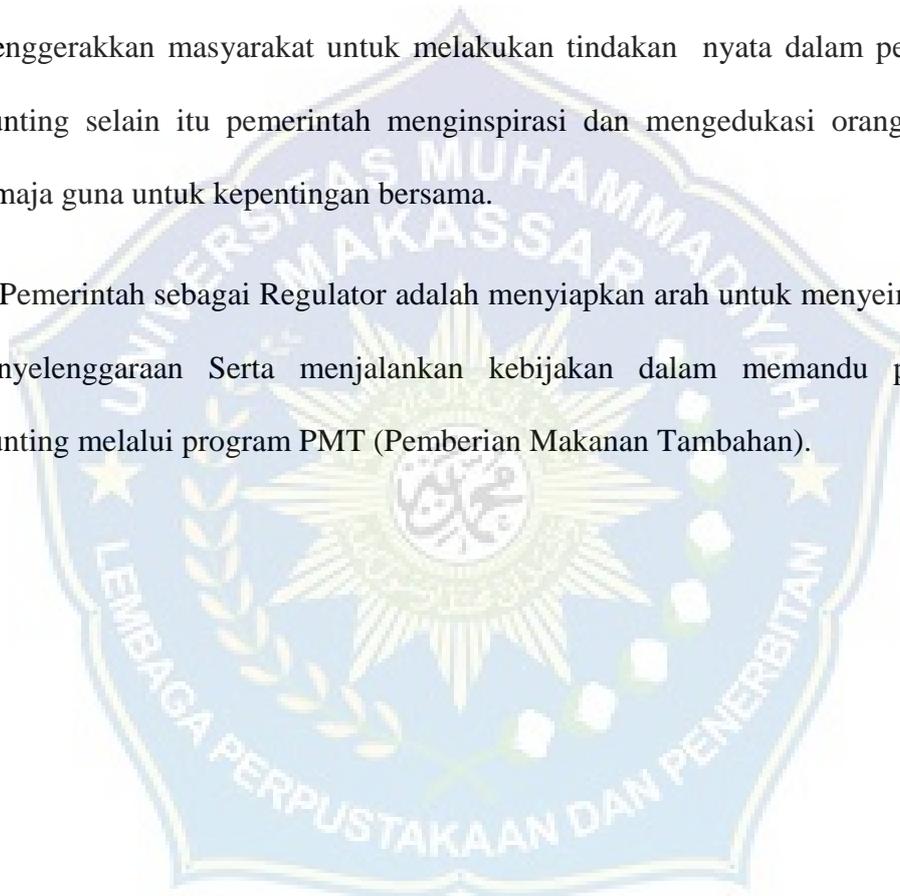
D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan diatas penulis akan mendeskripsikan indikator Peran Pemerintah Menurut Suhardono (2016) yaitu :

1. Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan.
2. Pemerintah sebagai Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna untuk kepentingan bersama.
3. Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan Serta menjalankan kebijakan dalam memandu penurunan stunting melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah dilaksanakan seminar proposal. Lokasi penelitian berada di Desa Laiya kecamatan cenrana, dalam Pengendalian stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berkembangnya Pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan cenrana, Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang didapatkan berupa bentuk informasi melalui tulisan ataupun informasi yang didapatkan dalam bentuk lisan yaitu pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai efektifitas pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

C. Sumber Data

Sumber data adalah dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama peneliti melaksanakan penelitiannya.

1. Data Perimer

Data perimer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya adalah informan yaitu orang-orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapat informasi atau data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder ini adalah data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Daftar Informan Penelitian

Informan penelitian adalah yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara mendetail, adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

No.	Nama Inisial	Pekerjaan/Jabatan
1.	A.S	Kepala Desa
2.	R	Bidan Desa
3.	H	Ketua Kader Posyandu
4.	R	Masyarakat

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan yang satu dengan yang lainnya.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Efektivitas pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang akurat dan relevan antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Efektivitas pengendalian stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dari pokok permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data atau pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap atau terinci. Laporan lapangan di rediksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian ini dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal lapangan serta dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpul.

G. Keabsahan Data

Triangulasi adalah metodologis pada penelitian kualitatif yang harus peneliti ketahui. Teknik triangulasi bertujuan meningkatkan kekuatan teoritis,

metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan pada sumber, teknik dan waktu (Mekarisce, 2020)

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat diperoleh dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dengan dokumen-dokumen yang ada. Perbandingan hasil wawancara dari informan (data primer) dengan buku bacaan atau file ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian (data sekunder)

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan teknik wawancara dilakukan pengecekan dengan teknik observasi ataupun dokumen.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan data yang lebih valid, peneliti dapat melakukan pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu kali dan dengan berbagai cara. Dalam hal ini peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat di pagi hari saat informan masih dalam keadaan kuat. Kemudian melakukan pengamatan kembali pada sore hari untuk mendapatkan data yang lebih valid dan memastikan data yang diperoleh tidak berbeda dari waktu ke waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokus penelitian

1. Gambar Umum Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Desa laiya terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 410-705 mdpl. Di desa ini terdapat sungai mallarunang yang difungsikan sebagai irigasi pertanian, sumber air baku, pengaturan tata air untuk memanimalisir potensi banjir. Desa Laiya adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Berjarak 5 km dari pusat pemerintahan kecamatan Bengo, 39 km dari pusat pemerintahan kabupaten Turikale dan berjarak 69 km dari makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Desa laiya merupakan perkampungan yang terbentuk sebagai pertemuan tempat persinggahan para gerilyawan perang Camba padan zaman kolonial. Laiya (Ejaan Van Ophuijsen: Laija; Lontara Bugis & Lontara Makassar: transliterasi: Laiya) adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Laiya berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Mayoritas penduduk Desa Laiya adalah Suku Makassar dan Bugis. Dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan Bahasa Dentong. Desa ini mudah diakses karena dilintasi oleh jalan Nasional Poros Maros-Bone.

Secara administratif luas wilayah Desa Laiya yaitu dengan luas 63,13km² yang meliputi 7 dusun yaitu, Dusun Bontomanai, Dusun Bonto Panno, Dusun Labuaja, Dusun Laiya, Dusun Mamampang, Dusun Matajang dan Dusun Pattalassang. Dengan batas wilayah desa:

Tabel 4.1 Batas wilayah Desa Laiya

Sebelah	Berbatasan
Utara	Desa Limapoccoe
Selatan	Desa Bonto Manai dan Desa Bonto Somba (Kecamatan Tompobulu)
Barat	Desa Samangki (Kecamatan Simbang) dan Desa Lebbotengngae
Timur	Desa Watang cani (Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone), Desa Erelembang (Kecamatan Tombopao, Kabupaten Gowa), dan Desa Cenrana Baru.

Sumber : *Profil Desa Laiya*

Desa Laiya ini berbatasan dengan 8 desa, 4 Kecamatan dan 2 Kabupaten, dengan peta wilayah.



Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Laiya

Sumber: *Profil Desa Laiya*

Desa Laiya memiliki luas 63,13 km² dan penduduk berjumlah 2.876 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 45,56 jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk desa laiya pada tahun tersebut adalah 98,62. artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 98 penduduk laki-laki.

2. Visi dan Misi Desa Laiya

a. Visi Desa

Dalam membangun kehidupan masyarakat tentunya harus memiliki sebuah visi pembangunan yang terarah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Visi ini merupakan visi Kepala Desa Laiya yang disusun sebelum ia dipilih menjadi Kepala Desa Laiya saat ia dicalonkan menjadi Kepala Desa. Adapun visi dari Desa Laiya untuk 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan masyarakat Desa Laiya yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan perdagangan, pertanian dan perkebunan yang baik”

b. Misi Desa

- 1) Meningkatkan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pelayanan petugas keamanan
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi

- 3) Menciptakan pelayanan yang merata berkeadilan dan tepat guna
- 4) Menciptakan kebersihan lingkungan hidup
- 5) Mengelola potensi alam
- 6) Membina SDM yang terampil dan handal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Laiya

Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur desa Laiya secara umum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2016. Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 39 sebagai berikut :

a.) Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
- d) Pemaberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kenitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b). Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekretaris desa mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
- b) Ketatan usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan eskpedisi, dan penataan administrasi

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c). Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasaranan, pemabangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyrakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

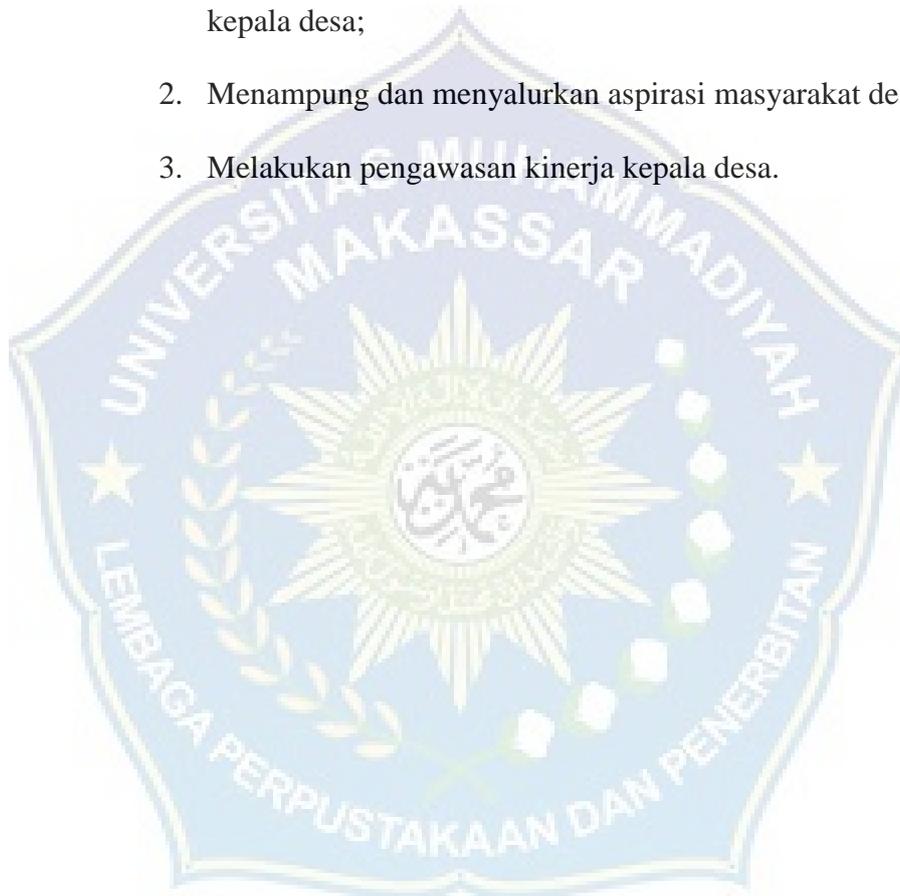
d). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk desa berdasar kan keterwakilan wilayah yang pengisiannya di lakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.

3. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

a). Fungsi BPD

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.



B. Hasil Penelitian

Dalam upaya pencegahan stunting yang dilakukan di desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Pemerintah desa, Bidan Desa, Dan Ketua Kader Posyandu merupakan gardan terdepan dalam memperkuat percepatan dan pencegahan stunting di masyarakat. Angka stunting di Desa Laiyadapat dilihat tiga tahun terakhir tepatnya di tahun 2021 angka stunting tidak begitu tinggi tetapi, di tahun 2022 tercatat sebagai angka stunting tertinggi dan di tahun 2023 stunting mengalami penurunan di kecamatan Cenrana sehingga pemerintah desa mengupayakan beberapa program untuk menekan angka stunting yang ada di Desa Laiya, sehingga hasil maksimal di dapat dari laporan penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM) Puskesmas Cenrana. Bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2 presentase stunting di kecamatan Cenrana.



Sumber: Pkm Puskesmas Cenrana

Peran pemerintah dalam pengendalian stunting telah berhasil mewujudkan penurunan stunting melalui program PMT (pemberian makanan tambahan) yang diberikan kepada sasaran balita stunting dengan perpersi benar selama 3 bulan melalui kader kesehatan dan pemberian edukasi kepada ibu balita atau pengasuh yang berjalan efektif selama 90 hari. Untuk mekanismenya selama 10 hari berturut-turut dalam satu bulan pertama balita stunting dibawa ke pos posyandu untuk diberikan makanan dengan menu yang berbeda setiap harinya. Pada hari pertama, anak akan diukur terlebih dahulu tinggi badannya dan setelah proses pemberian makanan selama 10 hari dalam 3 bulan anak akan kembali diukur tinggi badannya. Dalam anggaran belanja penanganan stunting selama 3 bulan cukup besar yaitu 55,224 juta, yang di peroleh dari dana desa Laiya pada tahun anggaran 2023. Anggaran penanganan stunting juga diambil dari dana desa Laiya dengan besaran bervariasi antara 100 juta sampai 200 juta sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Gambar diatas memperlihatkan bahwa kejadian stunting pada balita di Desa Laiya selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Kasus stunting terjadi pada tahun 2021 sebanyak 48 balita terdeteksi stunting yaitu (18,2%). Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 66 orang balita terdeteksi stunting (34,19%) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan stunting pada anak balita menjadi 33 orang (17,01%). Sehingga banyaknya kasus stunting menjadi acuan pemerintah lebih serius dalam melakukan berbagai upaya penurunan stunting pada ibu hamil dan balita.

Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengendalian stunting, peneliti akan menguraikan 3 (tiga) indikator peran pemerintah yaitu *fasilitator*, *mobilsator*, dan *regulator*, yang dikemukakan oleh Suhardono (2018). Oleh karena itu, hasil penelitian akan disajikan melalui metode wawancara pada pembahasan di bawah ini:

1. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan pak A.S selaku Kepala Desa Laiya tentang kasus stunting selama tiga tahun terakhir ini, mengalami peningkatan dan penurunan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut

“Sebagai kepala desa saya bertugas atau terlibat dalam memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat untuk memperlancar dan mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam penurunan stunting, contohnya mengajak kaum ibu memperhatikan pola sehat terutama pada saat hamil serta rutin mengikuti sosialisasi karena masyarakat awalnya tidak tahu apa yang di maksud dengan stunting kini telah mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan dan memperhatikan lingkungan sekitar”. (Hasil wawancara kepala desa A.S 16 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa kepala desa memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam penanganan stunting. Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Saya juga bergerak di bidang pendampingan seperti kami rutin turun kelapangan mengadakan sosialisasi diposyandu kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dengan mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pencegahan stunting di desa laiya. Saya juga berpesan kepada para kader posyandu harus bisa bersikap responsif terhadap kondisi keluarga sekitar, kader juga diharapkan mampu bersinergi secara baik sehingga kasus stunting dapat cepat terdeteksi, cepat dilaporkan dan cepat tertangani”. (Hasil wawancara kepala desa A.S 16 April 2024). Lebih lanjut beliau mengatakan :

“Saya juga mengajak kader Posyandu untuk melakukan pembangunan serta penyediaan makanan sehat untuk ibu hamil dan anak-anak”. (Hasil wawancara kepala desa A.S 16 April 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta dibidang pendanaan dan juga permodalan. Berikut adalah wawancara dari

Ketua Kader Posyandu:

“Kepala desa laiya memfasilitasi rumah posyandu dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan posyandu, adapun sarana yang diberikan sebagai berikut : Buku register, timbangan bayi dan alat ukur pada balita.”. (Hasil wawancara ketua H 18 April 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa ketua kader posyandu difasilitasi oleh pemerintah desa sudah cukup baik dengan adanya sarana dan prasarana serta pendanaan atau permodalan.

Lebih lanjut beliau mengatakan :

“Adapun masyarakat yang setiap bulan berkunjung ke pos posyandu kami berikan bantuan kepada ibu hamil dan balita secara bertahap baik berupa susu, biskuit dan vitamin. Adapun pemberian makanan tambahan kami datang langsung ke rumah-rumah yang mengalami stunting selama tiga bulan perbaikan gizi”.

Terlebih dahulu kita melihat wawancara dari salah satu masyarakat :

“dari sudut pandang saya pemerintah desa sudah berperan dengan baik dalam memfasilitasi pos posyandu adapun fasilitas yang saya lihat seperti alat-alat kesehatan sudah lengkap sehingga kami masyarakat dapat terlayani dengan baik sehingga kami sangat terbantu”. (Hasil wawancara R 18 april 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat yang berkunjung ke pos posyandu sudah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari kader posyandu dan bidan desa.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja dengan baik dalam memfasilitasi rumah posyandu untuk masyarakat setempat dengan mengajak masyarakat untuk ikut sosialisasi bahwa pentingnya pencegahan stunting.

Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan.

Jadi peran pemerintah telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama tiga bulan di Desa Laiya.

2. Pemerintah sebagai Mobilisator

Pemerintah sebagai Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna untuk kepentingan bersama. Berikut adalah wawancara dengan bidan Desa :

“Peran saya sebagai bidan desa adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan orang tua serta remaja untuk memberikan informasi dan mengedukasi ibu hamil dan orang tua balita serta memantau tumbuh kembang bayi setiap bulan secara terpadu di posyandu untuk mendeteksi dini stunting dan mengoptimalkan tinggi badan”. (Hasil wawancara dengan bidan desa R 18 April 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa, bidan desa memiliki peran untuk mengedukasi dan memantau setiap bulan secara terpadu di posyandu agar tidak terjadi kasus stunting pada balita. Berikut hasil wawancara dengan ketua kader posyandu:

“Saya berperan sebagai kader posyandu dalam pemberdayaan masyarakat dan juga memiliki peran penting dalam menggerakkan, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan memperoleh kebutuhan dasar.” (Hasil wawancara ketua kader posyandu H 18 April 2024). Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Adapun beberapa strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan mobilisasi sebagai kader posyandu yang pertama pembinaan kader posyandu, pelatihan kader posyandu, kurikulum dan program pelatihan, sistem pemantauan dan dukungan, serta pengembangan kapasitas kader, kemampuan kader, dan meningkatkan kesadaran dan penggalian pengetahuan”.(Hasil wawancara ketua kader posyandu H 18 April 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa ketua kader posyandu memiliki peran sebagai mobilisator untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kebutuhan dasar. Berikut adalah hasil wawancara dari salah satu masyarakat:

“Kami masyarakat diberi tahu oleh pemerintah desa atau kepala desa untuk mengikuti program pencegahan stunting yang pertama peningkatan gizi atau PMT untuk mencegah terjadi stunting.” (Hasil wawancara masyarakat R 18 April 2024).

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna untuk kepentingan bersama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai mobilisator untuk dapat menyadarkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.

3. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Serta menjalankan kebijakan dalam memandu penurunan stunting melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Berikut hasil wawancara dengan kepala Desa:

“sebagai kepala desa saya diarahkan dari pemerintah pusat untuk memandu masyarakat guna pencegahan stunting adapun cara atau langkah-langkah yang saya berikan kepada masyarakat yaitu saya mengarahkan masyarakat ke pos posyandu guna pelaksanaan

pemantauan tumbuh kembang anak dalam pencegahan penurunan stunting.”. (Hasil wawancara kepala desa A. S 16 April 2024).

Lebih lanjut beliau mengatakan :

“Adapun program PMT yang diluncurkan oleh pemerintah pusat yang dijalankan selama 3 bulan yang diberikan kepada balita yang terdeteksi stunting dan bumil kek (kekurangan gizi kronis).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa memberikan arah untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting dan adapun program yang diadakan yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita dan juga ibu hamil serta memastikan tidak adanya masyarakat yang terdampak atau terdeteksi stunting. Berikut wawancara dari salah satu masyarakat:

“Saya sebagai masyarakat melihat bahwa aturan yang di jalankan oleh pemerintah desa sangat baik. saya juga menganggap bahwa keberhasilan yang disusun oleh pemerintah dalam mencegah adanya stunting dengan mengadakan program PMT (pemberian Makanan tambahan).” (Hasil wawancara masyarakat R 18 April 2024).

Jadi Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa telah berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting serta adanya program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari pemerintah pusat untuk masyarakat setempat guna pencegahan stunting di desa laiya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

Menurut Suhardono (2016) terdapat tiga indikator :

1. Fasilitator

Menurut Suhardono (2016), dalam peranan ini pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Fasilitator berarti bahwa pemerintah desa memberikan kemudahan dan bantuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperlukan.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa sudah bekerja dengan baik dalam memfasilitasi rumah posyandu untuk masyarakat setempat dengan mengajak masyarakat untuk ikut sosialisasi bahwa pentingnya pencegahan stunting.

Menurut pendapat (Labolo, 2008) Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya, dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan

prasarana, pembangunan, baik sarana sumber daya alam, maupun sarana bagi sumber daya manusia. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan.

Jadi teori Suhardono (2016) telah sejalan dengan teori (Labolo, 2008) dimana Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan. Jadi peran pemerintah telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama tiga bulan di Desa Laiya.

2. Mobilisator

Menurut Suhardono (2016) dalam peranan ini, pemerintah desa berfungsi sebagai mobilisator, mobilisasi sumber daya dan potensi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mobilisator

berarti bahwa pemerintah desa memperluas jaringan dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna untuk kepentingan bersama.

Kata Mobilisator berasal dari kata “Mobilisasi”, menurut (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2017) mobilisasi adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan fisik yang disengaja dari tubuh. Ketika seseorang mampu bergerak, dia biasanya mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari (activity daily living). mobilisator dalam hal ini orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai mobilisator untuk dapat menyadarkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.

3. Regulator

Menurut Suhardono (2016) dalam peranan ini, pemerintah desa berfungsi sebagai regulator, mengatur dan mengawasi pelayanan publik

untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Regulator berarti bahwa pemerintah desa mengawasi dan mengatur agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pemerintah desa memberikan arah untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting dan adapun program yang diadakan yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita dan juga ibu hamil serta memastikan tidak adanya masyarakat yang terdampak atau terdeteksi stunting. Jadi Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa telah berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting serta adanya program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari pemerintah pusat untuk masyarakat setempat guna pencegahan stunting di desa laiya.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan (Labolo,2008). Peran pemerintah desa sebagai regulator mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di tingkat desa. Regulasi stunting dibuat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara

kementrian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari bab sebelumnya dapat disimpulkan mengenai peran pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa Laiya dari 3 indikator yang di pakai yaitu fasilitator, mobilisator dan regulator. Dimana ditemukan peran pemerintah sebagai *fasilitator* telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama tiga bulan di Desa Laiya. Peran pemerintah sebagai *mobilisator* cukup baik dalam mengedukasi dan menginspirasi orang tua atau remaja serta menyadarkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Peran pemerintah sebagai *regulator* telah berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan memastikan layanan berkualitas bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mengenai penurunan stunting di Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka:

Setelah melakukan penelitian terkait peran pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa Laiya Kecamatan cenrana Kabupaten Maros peneliti memberikan saran sebagai berikut

Kader posyandu harus rutin melakukan pengukuran tinggi badan pada kegiatan posyandu tiap bulannya guna memantau status gizi anak secara teratur.



DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. In *Jurnal Hukum & Pembangunan*. jhp.ui.ac.id.
<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1807/1512>
- Jampur, E. a. (2023). Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. *Jurnal Asawika*, 8(1), 37–41.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *jurnal ilmiah kesehatan masyarakat: media komunikasi komunitas kesehatan masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nur Azizah, Nastia, A. S. (2022). Strategi dinas kesehatan dalam menekan laju penderitaan stunting di kabupaten buton selatan. *jip: jurnal inovasi penelitian*, 2(12), 4145–4152.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *jurnal educatio: jurnal pendidikan indonesia*, 9(1), 188. <https://doi.org/10.29210/1202322804>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya penanganan stunting di indonesia analisis bibliometrik dan analisis konten. *jurnal ilmu pemerintahan suara khatulistiwa (jipsk)*, viii(01), 44–59.
- Regita, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran pemerintah desa dalam pencegahan dan penurunan stunting. *jurnal ilmu administrasi dan sosial*, 12(1), 121–128.
- Sihombing, lesro metua. (2022). *Peranan pemerin tah desa dalam memberika n pelaya n a n publik di desa lae pi n a n g kabupate n dairi skripsi oleh : lesro matua sihombi n g program studi admi n istrasi publik fakultas ilmu sosial ilmu politik u n iversitas meda n area meda n skrips.*
- Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran pemerintah desa ko'olan dalam penekanan stuntsuhroh, l., & pradana, g. w. (2021). peran pemerintah desa ko'olan dalam penekanan stunting melalui program gopo (gojek posyandu) sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten bangkalan. *publika*, 93–104.
- Susantri, A. E., & Putri, N. E. (n.d.). *Efektivitas pelaksanaan program pelayanan publik plus di kecamatan kuranji kota padang*. 1–11.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia

tenggara. *media penelitian dan pengembangan kesehatan*, 28(4), 247-256.

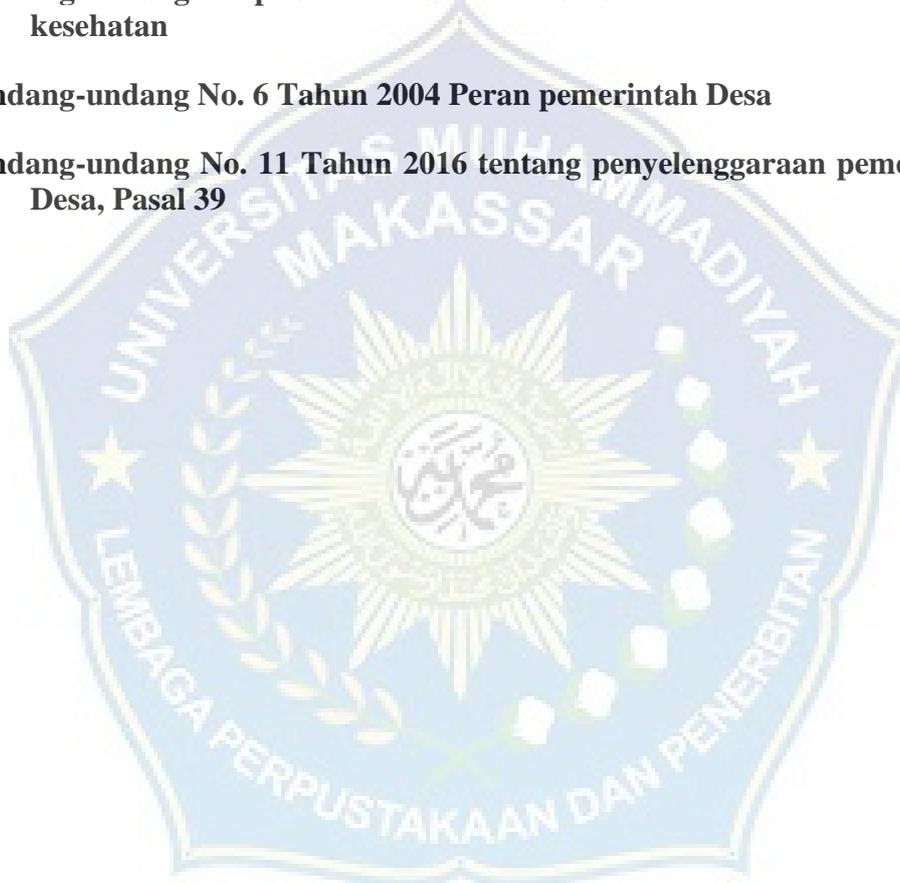
Lestari, D. N., & Herawat, N. R. (2022). peran pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini tahun 2021. *journal of politic and government studies*, 12(1), 392-416.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-undang No. 6 Tahun 2004 Peran pemerintah Desa

Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pasal 39



Lampiran:



Dok. 1 : Peneliti di saat Melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros



Dok. 2 : Pemberian Campak pada bayi dan Pengukuran Tinggi Badan pada anak balita di Desa Laiya.



Dok. 3 : Peneliti saat Melaksanakan Penelitian kepada Masyarakat dan Ketua Kader Posyandu di Desa Laiya.



Dok 4 : Pemberian susu pada anak balita dan foto bersama dengan petugas gizi puskesmas, ibu desa, bidan desa dan kader posyandu di desa Laiya.



Dok. 5 : Pemberian PMT pada anak balita dan pemberian vitamin kepada anak remaja di Desa Laiya.



DOKUMEN PENDUKUNG

LAMPIRAN: SK Pembimbing Penulisan Skripsi

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity · Professionalism · Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Memara Ipa Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email: fisip@unismuh.ac.id Official Web: https://fisip.unismuh.ac.id</small>
		
PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI Nomor : 2571/FSP/A.5-VI/X/1445/2023		
<p>Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :</p>		
N a m a Stambuk J u r u s a n	: Selpi Sukaesi : 105611103420 : Ilmu Administrasi Negara	
Dengan Rencana Judul Skripsi :		
<i>"Peran Pemerintah Desa Laiya dalam Penekanan Stunting melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Maros"</i>		
Pembimbing I Pembimbing II	: Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd : Ahmad Harakan, S.IP., M.HI	
Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.		
Di tetapkan : di Makassar Pada tanggal : 10 Oktober 2023		
Dekan,  <u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u> NBM. 730 727		
Tembusan Kepada yth :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing I 2. Pembimbing II 3. Ketua Jurusan 4. Mahasiswa yang bersangkutan 5. Arsip 		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Dipindai dengan CamScanner </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia Progress for the Nation and Humankind Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi Public Administration - Government Studies - Communication Science </div>		

LAMPIRAN : Surat Izin dari DPMPTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 7748/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Maros
Perihal	: izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3991/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SELPI SUKAESI
Nomor Pokok	: 105611103420
Program Studi	: Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sil Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Peran pemerintah dalam pengendalian stunting di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Apr s.d 01 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*

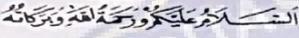
CS D:indai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Permohonan Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3991/05/C.4-VIII/III/1445/2024 28 March 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 18 Ramadhan 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0332/FSP/A.6-VIII/III/1445H/2024M tanggal 28 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SELPI SUKAESIH**
 No. Stambuk : **10561 1103402**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

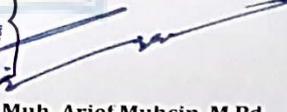
"Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 April 2024 s/d 3 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran




 dan LP3M,


Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

03-24

CS | Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN: Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Maros



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 156/IV/IP/DPMPSTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 177/IV/REK-IP/DPMPSTSP/2024

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : SELPI SUKAESI
Nomor Pokok : 105611103420
Tempat/Tgl.Lahir : MAROS / 15 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KAB. MAROS
Tempat Meneliti : DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN STUNTING DI DESA LAIYA
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS"**

Lamanya Penelitian : 01 April 2024 s/d 01 Juni 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 04 April 2024

KEPALA DINAS,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN: Lembar Hasil Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Selpi Sukaesi
Nim : 105611103420
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Indri Sulatrias, Hum., M.I.P
NBM. 964 591

Selpi Sukaesi 105611103420 Bab I

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Imardiani Imardiani, Dodik Firnando, Triya Cindy Franciska, Riska Wulandari et al. "Counseling on balanced nutrition 'isi piringku' to prevent stunting in toddlers aged 1-5 years", Community Empowerment, 2024 Publication	3%
2	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

LULUS

turnitin

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Selpi Sukaesi 105611103420 Bab II

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	4%
2	www.p2ptm.kemkes.go.id Internet Source	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	www.alodokter.com Internet Source	<1%
6	kompetensi.fkip.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1%
7	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1%
8	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
9	Sandra Harianis, Mia Ritasari, Dewi Erlina Asrita Sari, Madinah Madinah. "ANALISIS	<1%

Selvi Sukaesi 105611103420 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	3%
2	www.jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	3%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

^ Selpi Sukaesi 105611103420 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Dharmawangsa Student Paper	1%
3	ejournal.utp.ac.id Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	ml.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
7	tikaardini.wordpress.com Internet Source	<1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
9	mahmudiidi.wordpress.com Internet Source	<1%

Selpi Sukaesi 105611103420 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

bentek.lombokutarakab.go.id
Internet Source

3%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



SELPI SUKAESI, dilahirkan di Maros pada tanggal 15 September 2001 merupakan anak kedua dari lima bersaudara, memiliki saudara bernama Saenal Abidin, Saiful Jamil, Sartika Sari dan Muh.Yusuf serta merupakan anak dari pasangan Sirajuddin dan Mariati. Penulis beragama islam dan tinggal di Laiya Kecamatan

Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis yaitu: menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tinuna pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di Negeri 33 Satu Atap Bontto Panno pada tahun 2017, Sekolah Menengah Akhir di Negeri 4 Gowa pada tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu, penulis berharap mampu mengamalkan ilmu Khususnya di bidang ilmu Admnistrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan kedua orang tua dan keluarga besar serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.